

ANALISIS FUNGSI KELEMBAGAAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DI DESA PARAKANMANGGU KECAMATAN PARIGI KABUPATEN PANGANDARAN

Arien Fabeliarini¹, Aan Anwar Sihabudin², Endah Vestikowati³

Universitas Galuh, Ciamis, Indonesia^{1,2,3}

E-mail: Fabeliarini@gmail.com

ABSTRAK

Latar belakang penelitian ini adalah belum optimalnya fungsi kelembagaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa. Hal ini disebabkan belum optimalnya LPM dalam menyusun rencana pembangunan desa sesuai dengan aspirasi masyarakat, belum optimalnya LPM dalam mengarahkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam perencanaan maupun pelaksanaan program pembangunan di desa dan kurangnya LPM dalam meningkatkan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah desa pada masyarakat. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui fungsi kelembagaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Parakanmanggu Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandara, hambatan-hambatan dan upaya-upaya dalam fungsi kelembagaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Parakanmanggu Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran. Desain penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik pengolahan/analisis data penelitian ini yaitu reduksi data, penyajian data dan kesimpulan dan verifikasi. Berdasarkan hasil penelitian bahwa fungsi kelembagaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Parakanmanggu Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran bahwa pada umumnya dilaksanakan dengan kurang optimal. Hambatan-hambatan yang dihadapi berupa terbatasnya sumber daya manusia anggota, minimnya sumber anggaran yang dimiliki, belum memadainya fasilitas pendukung pelaksanaan pekerjaan, kurangnya pemberian arahan dan bimbingan serta ajakan pada anggota, kurangnya kesediaan dan motivasi anggota, menurunnya partisipasi masyarakat dan kurangnya penampungan aspirasi masyarakat serta kurangnya pemberian pembinaan pada anggota. Upaya-upaya yang dilakukan yaitu melalui pemberian arahan dan petunjuk serta bimbingan pada anggota secara rutin, pengajuan tambahan alokasi anggaran pada pemerintah desa maupun pemerintah daerah, penyediaan sarana dan prasarana pendukung pekerjaan, pemberian arahan dan ajakan pada masyarakat tentang pentingnya partisipasi masyarakat, meningkatkan kemampuan SDM melalui penyelenggaraan pengembangan sumber data manusia dan menyeleksi anggota untuk menduduki posisi tugas sesuai

dengan kemampuan dan kompetensinya, memberikan kesempatan untuk meningkatkan kualifikasi pendidikan dan wawasan pengetahuannya

Kata Kunci: *Fungsi, Kelembagaan, Pelaksanaan Pembangunan*

PENDAHULUAN

Keberhasilan pembangunan desa tidak lepas dari adanya dukungan berbagai pihak baik pemerintah desa, LPMD dan masyarakat. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa merupakan lembaga yang dibentuk oleh masyarakat dan berfungsi sebagai mitra pemerintah desa dalam pelaksanaan dan pengendalian pembangunan, hal tersebut diatur sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan.

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) merupakan salah satu lembaga kemasyarakatan desa yang mempunyai peranan penting dalam pembangunan di desa, baik dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa dalam pembangunan desa, dalam menyusun rencana dan melaksanakan pembangunan desa, maupun dalam menumbuhkan dan menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. LPMD yang dalam hal ini sebagai mitra pemerintah desa yang mempunyai tugas pokok dan fungsi untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan suatu pembangunan tentunya perlu menjalin hubungan yang baik dengan pemerintah desa dan masyarakat.

Untuk dapat menjalankan fungsinya tersebut secara efektif, maka LPM harus didukung oleh sumberdaya manusia pengurus/anggota yang mempunyai kualitas pengetahuan dan

kecakapan/keterampilan yang memadai di bidang pembangunan desa. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) adalah Lembaga Kemasyarakatan yang tumbuh dari, oleh, dan untuk masyarakat desa, merupakan wahana partisipasi dan aspirasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan yang bertumpu pada masyarakat desa, yang bertujuan untuk meningkatnya kesadaran masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan, meningkatnya kemampuan masyarakat sebagai Sumber Daya Manusia (SDM) untuk mengola dan memanfaatkan potensi Sumber Daya Alam (SDA) terutama dalam bidang agrobisnis dan pariwisata, Meningkatkan ekonomi kerakyatan dalam upaya pengentasan kemiskinan.

Pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh Desa untuk melaksanakannya yang dalam hal ini pelaksanaannya dilakukan oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM). Dalam hal ini LPM merupakan mitra kerja pemerintahan desa dibidang perencanaan pembangunan, menggerakkan partisipasi masyarakat secara aktif dan positif untuk melaksanakan dan mengendalikan pembangunan secara terpadu baik yang berasal dari berbagai kegiatan

pemerintah maupun swadaya gotong royong masyarakat dan menumbuhkan kondisi dinamis masyarakat agar pelaksanaan pembangunan bisa terlaksana dan berhasil dengan baik.

Masalah yang mendesak untuk diselesaikan adalah bagaimana membangun pedesaan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada, termasuk sumber daya manusia sehingga bermanfaat bagi desa. Upaya yang penting untuk dilakukan agar masyarakat desa mampu bertanggung jawab dan mengelola sumberdaya yang dimiliki adalah penumbuhan kapasitas organisasi lokal agar dapat menentukan kebutuhan, tujuan dan aspirasi serta mengambil kebutuhan yang berdampak pada peningkatan kondisi hidupnya.

Landasan hukum dari peran LPM dalam pembangunan desa yang berlaku sekarang adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yaitu pada pasal 94, yang menyebutkan:

1. Desa memberdayakan lembaga kemasyarakatan desa yang ada (rukun tetangga, rukun warga, pemberdayaan kesejahteraan keluarga, karang taruna, lembaga pemberdayaan masyarakat) dalam membantu pelaksanaan fungsi penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa;
2. Lembaga kemasyarakatan desa merupakan wadah partisipasi masyarakat desa sebagai mitra pemerintah desa;
3. Lembaga kemasyarakatan desa bertugas melakukan pemberdayaan masyarakat desa, ikut serta merencanakan dan melaksanakan

pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat desa;

4. Pelaksanaan program dan kegiatan yang bersumber dari pemerintah, daerah propinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota, dan lembaga non-pemerintah wajib memberdayakan dan mendayagunakan lembaga kemasyarakatan yang sudah ada di desa.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, desa mendayagunakan lembaga kemasyarakatan desa yang ada dalam membantu pelaksanaan fungsi penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud lembaga kemasyarakatan mempunyai fungsi: penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat; penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Di Desa Parakanmunggu Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) sudah ada di tengah-tengah masyarakat, akan tetapi masih terdapat kebijakan-kebijakan pembangunan yang belum direalisasikan. Dalam penyusunan rencana pembangunan desa diperlukannya sinergisitas atau kerjasama yang baik antara Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dengan pemerintah desa, namun demikian kenyataannya tidak sesuai dengan yang diharapkan, rancangan pembangunan yang dihasilkan kurang sesuai dengan kebutuhan, hal ini disebabkan oleh masih rendahnya pemahaman terhadap tugas pokok dan fungsi dari LPM yang ada di Desa

Parakanmanggu, tingkat intensitas pertemuan atau rapat koordinasi yang masih kurang, dan kurangnya koordinasi antar sesama anggota LPM maupun dengan aparat desa sehingga terkadang kurang memberikan manfaat untuk kepentingan masyarakat.

Kondisi tersebut dapat dilihat bahwa banyaknya proyek atau program-program di berbagai sektor yang masuk ke desa dan telah didukung oleh anggaran yang cukup besar, kenyataannya hanya mampu menjadikan masyarakat desa sebagai penerima pasif tanpa ada keterlibatan secara aktif atau lebih dikenal dengan pembangunan. Rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam tahap-tahap pembangunan yang ada sehingga timbul kesan pembangunan tidak tepat sasaran dengan kebutuhan masyarakat. LPM tidak pernah datang ke dusun-dusun memberikan bimbingan ataupun mengarahkan masyarakat untuk ikut serta dalam proses perencanaan pembangunan di desa. Selain itu juga LPM selaku lembaga penggerak partisipasi masyarakat masih dirasakan kurang memantau perkembangan masyarakat, dan menggerakkan masyarakat untuk dapat ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan. LPM sebagai lembaga penggerak roda pembangunan belum mampu meningkatkan semangat partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan di desa Desa Parakanmanggu.

Adapun pembangunan yang telah dilaksanakan di Desa Parakanmanggu pada tahun anggaran 2017-2018 antara lain penataan kelembagaan desa, pembangunan fisik seperti pembangunan dan pengaspalan jalan desa di Dusun Cijoho RT 02 RW 04, pembangunan bak penampungan air di

Dusun Parakan, rehab gedung balai desa, pembangunan gedung PAUD, pembangunan drainase di Dusun Dukuh Satu dan Warung Simpang, pembangunan rumah layak huni dan pembangunan mushollah di RT. 04. RW. 01 Dusun Cimanggu.

Selain itu dalam mengarahkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam perencanaan maupun pelaksanaan program pembangunan di desa, LPM belum optimal dalam mensosialisasikan program-program kerja pemerintah desa yang telah disetujui bersama yang akibatnya masyarakat kurang termotivasi dan mengetahui program pembangunan yang akan dikerjakan serta tujuan/sasaran dari pembangunan tersebut

Untuk menggali dan memanfaatkan sumber daya kelembagaan bagi pembangunan di Desa Parakanmanggu melalui pelaksanaan berbagai program pemberdayaan masyarakat dalam pelestarian nilai-nilai sosial budaya, pelaksanaan dan peningkatan ekonomi masyarakat, serta pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya manusia. LPM masih dirasakan kurang melakukan hubungan kerja sama dan saling membantu baik bersifat partisipatif dan konsultatif dalam pelaksanaan program pembangunan dengan pemerintahan desa bersama perangkatnya RT, RW dan masyarakat setempat.

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan di Desa Parakanmanggu Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran, ditemukan permasalahan mengenai belum optimalnya fungsi kelembagaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa.

Hal ini ditunjukkan dari indikator-indikator sebagai berikut:

1. Belum optimalnya LPM dalam menyusun rencana pembangunan desa sesuai dengan aspirasi masyarakat sehingga rancangan pembangunan yang dihasilkan kurang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Contoh: LPM kurang memiliki pemahaman dan kemampuan pada tugas pokok dan fungsi dari LPM terutama dalam menyalurkan aspirasi masyarakat
2. Belum optimalnya LPM dalam mengarahkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam perencanaan maupun pelaksanaan program pembangunan di desa. Contoh: LPM belum optimal dalam mensosialisasikan program-program kerja pemerintah desa yang telah disetujui bersama sehingga masyarakat kurang termotivasi dan mengetahui program pembangunan yang akan dikerjakan
3. Kurangnya LPM dalam meningkatkan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah desa pada masyarakat. Contoh: LPM kurang melakukan hubungan kerja sama dan saling membantu baik bersifat partisipatif dan konsultatif dalam pelaksanaan program pembangunan dengan pemerintahan desa.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana fungsi kelembagaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Parakanmunggu Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran? 2) Bagaimana hambatan-hambatan yang

dihadapi dalam fungsi kelembagaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Parakanmunggu Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran? 3) Bagaimana upaya-upaya mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam fungsi kelembagaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Parakanmunggu Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran?.

KAJIAN PUSTAKA

Pengertian Fungsi

Fungsi merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pegawai baik itu fungsi manajerial maupun fungsi operatif (teknis), yang pada hakikatnya bertujuan untuk melakukan kegiatan-kegiatan dengan pekerjaan yang dijabat seseorang.

Definisi tersebut memiliki persepsi yang sama dengan definisi fungsi menurut Sutarto (2012:22), yaitu “Fungsi adalah rincian tugas yang sejenis atau erat hubungannya satu sama lain untuk dilakukan oleh seorang pegawai tertentu yang masing-masing berdasarkan sekelompok aktivitas sejenis menurut sifat atau pelaksanaannya”.

Pembangunan lembaga dapat dirumuskan sebagai perencanaan, penataan, dan bimbingan dari organisasi-organisasi baru atau yang disusun kembali. Variabel atau faktor yang penting untuk membimbing kegiatan pembangunan lembaga yaitu variabel lembaga yang pada dasarnya menyangkut organisasi menurut Suharto (2016:217) terdapat lima kelompok variabel lembaga yaitu:

1. Kepemimpinan

Inti kepemimpinan adalah penerahan dan pembagian sumber-sumber daya supaya dapat mencapai sasaran tertentu. Kepemimpinan meliputi perumusan doktrin dan program dengan membuat pilihan-pilihan yang normatif dan empiris mengenai penggunaan sumber daya organisasi secara optimal.

2. Doktrin

Doktrin dapat membuat proses pelebagaan lebih efisien dan efektif dengan cara menegaskan tujuan-tujuan secara jelas dan membenarkan sarana-sarana yang tepat dan produktif

3. Program

Program berupa penjabaran doktrin menjadi kegiatan-kegiatan praktis dari organisasi. Program yang disusun dan diimplementasikan oleh pemerintah desa cenderung spontan, kurang terencana dan banyak disusupi kepentingan elite.

4. Sumber Daya

Sumber daya adalah masukan-masukan keuangan, fisik, manusia, teknologi dan penerapan dari lembaga tersebut. Sumber daya organisasi berkaitan dengan faktor-faktor produksi bagi organisasi

5. Struktur Intern

Struktur intern dirumuskan sebagai struktur dan proses-proses yang diadakan untuk bekerjanya lembaga tersebut dan bagi pemeliharaannya

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Hikmat (2010:68) pengertian Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) sebagai berikut :
“LPM adalah singkatan dari Lembaga

Pemberdayaan Masyarakat yang merupakan suatu institusi atau lembaga masyarakat dalam mengembangkan keswadayaan masyarakat guna memacu kegiatan pembangunan desa, yang berasaskan kemandirian, keswadayaan dan pemerataan”.

Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat disampaikan bahwa LPM merupakan suatu lembaga yang dibentuk masyarakat dalam meningkatkan dan memfasilitasi keswadayaan masyarakat agar mampu membangun dan mengembangkan kemampuan hidupnya secara mandiri, swadaya dan swakelola guna mencapai suatu tingkat kesejahteraan bagi warga masyarakat dimana LPM tersebut berada (berperan) sebagai institusi yang mawadahi potensi dan gerakan-gerakan masyarakat dalam pembangunan.

Pengertian Pembangunan Desa

Menurut Nurman, (2015: 266-267), dalam sebuah pembangunan desa, maka akan terlaksana dengan baik dan terarah sesuai dengan tujuan awal. Secara khusus dari pembangunan desa sebagai berikut:

1. Meningkatkan kemampuan kelembagaan masyarakat di tingkat desa dalam penyusunan perencanaan pembangunan secara partisipatif;
2. Meningkatkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat dalam memberikan makna dalam perencanaan pembangunan;
3. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pembangunan; dan

4. Menghasilkan keterpaduan antar bidang/sector dan kelembagaan dalam kerangka.

Dengan demikian bahwa hakikat tujuan dari pembangunan desa adalah meningkatkan kualitas hidup dari masyarakat desa melalui kegiatan-kegiatan pencapaian tujuan dari berbagai bidang (sosial, ekonomi, pendidikan, sarana kesehatan, budaya, agama, politik, dan keamanan) secara berkesinambungan dengan tetap mengedepankan kesamaan hak sekaligus tetap menjunjung tinggi keadilan seluruh masyarakat.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini deskriptif dengan pendekatan kualitatif. hal ini karena penelitian ini untuk mempertegas permasalahan sehingga diketahui cara pemecahan masalahnya. Dalam hal ini masalahnya sudah jelas, akan tetapi langkah yang terpenting adalah penegasan konsep-konsep yang relevan.

Jumlah informan dalam penelitian ini sebanyak 12 orang. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data meliputi wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik pengolahan/ analisis data penelitian ini yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Fungsi Kelembagaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelaksanaan

Pembangunan di Desa Parakanmunggu Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai fungsi kelembagaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Parakanmunggu Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran bahwa pada umumnya dilaksanakan dengan kurang optimal. Hal ini ditunjukkan dengan sebagian besar informan menyatakan dilaksanakan dengan kurang optimal.

Untuk lebih jelasnya mengenai pembahasan setiap dimensinya dapat dipaparkan sebagai berikut:

a. Kepemimpinan

Berdasarkan hasil penelitian pada dimensi kepemimpinan bahwa pelaksanaan indikator penyusunan tujuan yang hendak dicapai dalam pelaksanaan pembangunan desa masih kurang dapat dilaksanakan dengan optimal. Hal ini ditunjukkan dengan kurangnya penampungan aspirasi masyarakat terkait dengan perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan sehingga dalam musrenbangdes partisipasi masyarakat masih minim. Kemudian pelaksanaan indikator sasaran-sasaran yang hendak dicapai dalam pelaksanaan pembangunan desa masih kurang optimal dalam melaksanakannya. Hal ini ditunjukkan dengan minimnya pemberdayaan masyarakat Desa, kurangnya ikut serta masyarakat dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan, serta

kurang dapat meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.

Selanjutnya untuk pelaksanaan indikator pengaturan terhadap fasilitas pendukung dalam pelaksanaan pembangunan desa masih kurang optimal dilaksanakan mengingat ketersediaan fasilitas tersebut masih minim dimiliki LPMD. LPMD sulit untuk mengatur fasilitas guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Pemimpin mempunyai tanggung jawab baik secara fisik maupun spiritual terhadap keberhasilan aktivitas kerja dari yang dipimpin, sehingga menjadi pemimpin itu tidak mudah dan tidak akan setiap orang mempunyai kesamaan di dalam menjalankan kepemimpinannya. Kepemimpinan merupakan kemampuan seseorang dalam mempengaruhi, menggerakkan, mendorong, mengendalikan orang lain atau bawahannya untuk melakukan sesuatu pekerjaan atas kesadarannya dan berkontribusi dalam mencapai suatu tujuan.

Dengan demikian hal tersebut di atas sejalan dengan pendapat Yukl, (2013:4) bahwa:

Kepemimpinan adalah kemampuan individu untuk mempengaruhi, memotivasi, dan membuat orang lain mampu memberikan kontribusinya demi efektivitas dan keberhasilan organisasi. Kepemimpinan merupakan cara mempengaruhi dan memotivasi orang lain agar

orang tersebut mau berkontribusi untuk keberhasilan organisasi.

Dengan demikian kepemimpinan merupakan aktivitas untuk mempengaruhi orang-orang supaya diarahkan mencapai tujuan organisasi. Kepemimpinan meliputi proses mempengaruhi dalam menentukan tujuan organisasi, memotivasi perilaku pengikut untuk mencapai tujuan, mempengaruhi untuk memperbaiki kelompok dan budayanya.

Menurut Sutikno, (2014:16) bahwa: “Kepemimpinan dalam organisasi diarahkan untuk mempengaruhi orang-orang yang dipimpinnya, agar mau berbuat seperti yang diharapkan ataupun diarahkan oleh orang lain yang memimpinya”.

Dengan demikian bahwa kepemimpinan merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam suatu organisasi karena sebagian besar keberhasilan dan kegagalan suatu organisasi ditentukan oleh kepemimpinan dalam organisasi tersebut. Dengan kepemimpinan yang dilakukan seorang pemimpin juga menggambarkan arah dan tujuan yang akan dicapai dari sebuah organisasi. Sehingga dapat dikatakan kepemimpinan sangat berpengaruh bagi nama besar organisasi.

b. Doktrin

Berdasarkan hasil penelitian pada dimensi doktrin bahwa untuk pelaksanaan indikator pembagian tugas masing-masing anggota dalam pelaksanaan pembangunan desa telah dilaksanakan dengan optimal seperti

yang tercantum dalam bagan struktur organisasi yang didalamnya ada ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara dan seksi-seksi. Pembagian tugas ini dilakukan untuk mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga. Kemudian pelaksanaan indikator Lembaga Pemberdayaan Masyarakat telah memiliki standar kerja dalam melaksanakan pekerjaan seperti dalam pelaksanaan fungsi penampung aspirasi, anggota LPMD dapat berdialog dengan masyarakat dan menyerap berbagai aspirasi masyarakat tentang pembangunan desa.

Doktrin sebagai prinsip yang secara luas dianut. Namun, doktrin memiliki pengertian tidak sebatas itu melainkan juga dengan pengertian yang lebih luas dan mendalam. Suatu pemikiran yang berusaha ditunjukkan melalui metafora bahwa doktrin bermaksud bagaikan jaring yang saling mengikat dan berhubungan satu dengan yang lain. Makna doktrin ialah lebih kepada suatu ajaran yang mana pada isinya yaitu dalam rangka bagaimana menjelaskan hukum sebagai suatu sistem.

Pengertian yang sama juga dapat ditemukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Depdiknas 2007: 239) yaitu: “Doktrin adalah ajaran atau asas suatu aliran politik, keagamaan; pendirian segolongan ahli ilmu pengetahuan, keagamaan, ketatanegaraan secara bersistem, khususnya dalam penyusunan kebijakan negara”.

Dari penjelasan yang telah diuraikan di atas dapat disimpulkan bahwa doktrin adalah ajaran-ajaran atau pendirian suatu agama atau aliran atau segolongan ahli yang tersusun dalam sebuah sistem yang tidak bisa terpisahkan antara yang satu dengan yang lainnya.

c. Program

Program merupakan pernyataan yang berisi kesimpulan dari beberapa harapan atau tujuan yang saling bergantung dan saling terkait, untuk mencapai suatu sasaran yang sama. Biasanya suatu program mencakup seluruh kegiatan yang berada di bawah unit administrasi yang sama, atau sasaran-sasaran yang saling bergantung dan saling melengkapi, yang semuanya harus dilaksanakan secara bersamaan atau berurutan.

Dengan demikian urain di atas sejalan dengan pendapat Sunarti (2014:2) yang menyatakan bahwa: “Program adalah kegiatan-kegiatan prinsip yang telah ditentukan untuk dilaksanakan oleh organisasi dengan maksud untuk menerapkan strategi-strategi yang telah disusun”.

Program merupakan tahap-tahap dalam penyelesaian rangkaian kegiatan yang berisi langkah-langkah yang akan dikerjakan untuk mencapai tujuan dan merupakan unsur pertama yang harus ada demi tercapainya kegiatan implementasi. Menurut Manila, (2006 : 43), program akan menunjang implementasi, karena dalam program telah dimuat berbagai aspek antara lain:

- a. Adanya tujuan yang ingin dicapai.

- b. Adanya kebijaksanaan-kebijaksanaan yang diambil dalam mencapai tujuan itu.
- c. Adanya aturan-aturan yang harus dipegang dan prosedur yang harus dilalui.
- d. Adanya perkiraan anggaran yang dibutuhkan.
- e. Adanya strategi dalam pelaksanaan

Dengan demikian program merupakan suatu unit atau suatu kesatuan kegiatan maka program merupakan sebuah sistem, yaitu rangkaian kegiatan yang dilakukan bukan hanya satu kali tetapi berkesinambungan. Oleh karena itu suatu program merupakan kegiatan yang direncanakan maka tentu saja perencanaan itu diarahkan pada pencapaian tujuan.

d. Sumber Daya

Berdasarkan hasil penelitian pada dimensi sumber daya bahwa pelaksanaan indikator sumber daya manusia anggota yang memadai dalam pelaksanaan pembangunan desa tersedia dengan kurang memadai seperti masih adanya kualifikasi pendidikan anggota yang rendah, pengalaman bidang keorganisasian yang masih kurang dan tentunya kemampuan dan kompetensinya masih rendah. Kemudian pelaksanaan indikator biaya untuk pelaksanaan tugas dalam pelaksanaan pembangunan desa masih belum memadai sehingga untuk biaya operasional anggota kurang memadai.

Selanjutnya pelaksanaan indikator penyediaan sarana dan

prasarana guna mendukung pelaksanaan pembangunan desa yang dimiliki LPMD masih belum memadai. Penyediaan sarana dan prasarana guna mendukung pelaksanaan pembangunan desa masih jauh dari harapan yang disebabkan oleh keterbatasan sarana dan fasilitas pendukung.

Dalam rangka persaingan ini organisasi harus memiliki sumber daya yang tangguh. Sumber daya dibutuhkan organisasi tidak dapat dilihat sebagai bagian yang berdiri sendiri, tetapi sebagai satu kesatuan yang tangguh membentuk suatu sinergi. Sumber daya dalam sebuah program tidak hanya sumber daya manusia saja, melainkan sarana dan prasarana juga merupakan faktor yang mendukung keberhasilan suatu program.

Uraian di atas sesuai dengan yang dikemukakan Winarno (2016:161) bahwa:

Sumber-sumber yang dapat menentukan keberhasilan pelaksanaan adalah salah satunya sumber daya yang tersedia, karena sumber daya merupakan sumber penggerak dari pelaksana. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan keberhasilan proses pelaksanaan, sedangkan sumber daya merupakan keberhasilan organisasi yang dipengaruhi dengan pemanfaatan sumber daya manusia, biaya, dan waktu.

Setiap organisasi memerlukan sumber daya untuk mencapai

tujuannya. Sumber daya merupakan sumber energi, tenaga, kekuatan yang diperlukan untuk menciptakan daya, gerakan, aktivitas, kegiatan, dan tindakan. Sumber daya tersebut antara lain terdiri atas sumber daya alam, sumber daya finansial, sumber daya manusia, sumber daya ilmu pengetahuan, dan sumber daya teknologi.

Dengan demikian, sumber-sumber merupakan faktor yang penting keberhasilan organisasi. Sumber aaya yang penting sebagai penunjang, meliputi: staf yang memadai serta keahlian-keahlian yang baik untuk melaksanakan tugas-tugas mereka, wewenang dan fasilitas-fasilitas yang diperlukan untuk menerjemahkan usul-usul diatas kertas guna melaksanakan pelayanan-pelayanan publik.

e. Struktur Intern

Berdasarkan hasil penelitian pada dimensi struktur intern bahwa pelaksanaan indikator penyusunan struktur organisasi kelembagaan dalam pelaksanaan pembangunan desa telah dilaksanakan dengan optimal seperti adanya struktur organisasi dari LPMD itu sendiri yang seksi-seksinya mencerminkan pembangunan desa. LPMD menetapkan seksi-seksi dalam tugas dan fungsinya ini untuk membantu keberhasilan pelaksanaan pembangunan.

Kemudian pelaksanaan indikator sistem dan mekanisme pelaksanaan pekerjaan dalam pelaksanaan pembangunan desa telah dilaksanakan dengan optimal seperti pembagian

tugas dan fungsi dalam melaksanakan pekerjaannya, menjalin kerjasama dengan masyarakat, penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat terkait dengan kebutuhan pembangunan yang termasuk skala prioritas dan lain sebagainya.

Struktur intern organisasi menspesifikasikan pembagian kerja dan menunjukkan bagaimana fungsi atau aktivitas yang beraneka ragam yang dihubungkan sampai batas tertentu, juga menunjukkan tingkat spesialisasi aktivitas kerja. Struktur organisasi menjelaskan bagaimana tugas kerja akan dibagi, dikelompokkan dan dikoordinasikan secara formal. Struktur organisasi menunjukkan kerangka dan susunan perwujudan pola tetap hubungan diantara fungsi, bagian atau posisi maupun orang-orang yang menunjukkan tugas, wewenang dan tanggung jawab yang berbeda-beda dalam suatu organisasi.

Uraian di atas sejalan dengan pendapat Ismail, (2009:136) yang menyatakan bahwa: “Struktur Birokrasi, merupakan susunan komponen (unit-unit) kerja dalam organisasi yang menunjukkan adanya pembagian kerja serta adanya kejelasan bagaimana fungsi-fungsi atau kegiatan yang berbeda-beda diintegrasikan atau dikoordinasikan, selain itu struktur”.

2. Hambatan-Hambatan yang Dihadapi dalam Fungsi Kelembagaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan di Desa

**Parakanmunggu Kecamatan
Parigi Kabupaten Pangandaran**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai hambatan-hambatan yang dihadapi dalam fungsi kelembagaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Parakanmunggu Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran antara lain sebagai berikut:

- a. Belum optimalnya pengaturan organisasi yang disebabkan oleh terbatasnya sumber daya manusia anggota, minimnya sumber anggaran yang dimiliki dan belum memadainya fasilitas pendukung pelaksanaan pekerjaan
- b. Belum optimalnya penggerakan anggota untuk membantu dalam pelaksanaan pembangunan desa yang disebabkan oleh kurangnya pemberian arahan dan bimbingan serta ajakan pada anggota dan kurangnya kesediaan dan motivasi anggota
- c. Belum optimalnya penyusunan tujuan yang hendak dicapai yang disebabkan oleh menurunnya partisipasi masyarakat, kurangnya penampungan aspirasi masyarakat terkait dengan perencanaan pembangunan
- d. Belum optimalnya pengaturan terhadap fasilitas pendukung yang disebabkan oleh minimnya fasilitas yang dimiliki dan sumber anggaran yang belum memadai
- e. Belum optimalnya pembagian tugas masing-masing anggota yang disebabkan oleh kurang sesuai kemampuan dengan kedudukan

jabatan yang emban dan rendahnya SDM anggota.

- f. Belum memadainya sumber daya manusia anggota yang disebabkan oleh kurangnya kemampuan dan kompetensi, rendahnya kualifikasi pendidikan yang dimiliki dan kurangnya pemberian pembinaan pada anggota
- g. Belum memadainya ketersediaan biaya untuk pelaksanaan tugas yang disebabkan oleh belum dimilikinya sumber anggaran yang memadai
- h. Belum memadainya penyediaan sarana dan prasarana yang disebabkan oleh minimnya sumber anggaran yang dimiliki LPMD

Berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam fungsi kelembagaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Parakanmunggu Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran antara lain terbatasnya sumber daya manusia anggota, minimnya sumber anggaran yang dimiliki, belum memadainya fasilitas pendukung pelaksanaan pekerjaan, kurangnya pemberian arahan dan bimbingan serta ajakan pada anggota, kurangnya kesediaan dan motivasi anggota, menurunnya partisipasi masyarakat dan kurangnya penampungan aspirasi masyarakat serta kurangnya pemberian pembinaan pada anggota.

**3. Upaya-Upaya Mengatasi
Hambatan-Hambatan yang
Dihadapi dalam Fungsi
Kelembagaan Lembaga**

Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan di Desa Parakanmunggu Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai upaya-upaya mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam fungsi kelembagaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Parakanmunggu Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran, antara lain sebagai berikut:

- a. Mengoptimalkan pengaturan organisasi dengan cara sumber daya manusia anggota LPMD dengan diberikannya arahan dan petunjuk serta bimbingan pada anggota secara rutin, selanjutnya upaya pengajuan tambahan alokasi anggaran pada pemerintah desa dan penyediaan sarana dan prasarana pendukung pekerjaan.
- b. Mengoptimalkan penggerakan anggota untuk membantu dalam pelaksanaan pembangunan desa dengan cara diberikannya arahan dan bimbingan serta ajakan pada anggota
- c. Mengoptimalkan penyusunan tujuan yang hendak dicapai melalui dilakukannya pemberian arahan dan ajakan pada masyarakat tentang pentingnya partisipasi masyarakat, anggota mendatangi masyarakat untuk menampung aspirasi masyarakat terkait dengan perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan.
- d. Mengoptimalkan pengaturan terhadap fasilitas pendukung dengan cara mengajukan permohonan penambahan alokasi anggaran pada pemerintah desa untuk pengadaan dan melengkapi fasilitas pendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya
- e. Mengoptimalkan pembagian tugas masing-masing anggota dengan cara meningkatkan kemampuan SDM melalui penyelenggaraan pengembangan sumber data manusia dan menyeleksi anggota untuk menduduki posisi tugas sesuai dengan kemampuan dan kompetensinya
- f. Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia anggota dengan cara meningkatkan kemampuan dan kompetensi dengan diberikannya pemahaman dan penjelasan serta petunjuk pelaksanaan tugas dan memberikan kesempatan untuk meningkatkan kualifikasi pendidikan dan wawasan pengetahuannya.
- g. Menyediakan biaya yang memadai untuk pelaksanaan tugas dengan cara pengajuan permohonan penambahan alokasi anggaran pada pemerintah desa dan pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi LPMD
- h. Menyediakan sarana dan prasarana yang lebih memadai dengan cara pengajuan penambahan alokasi anggaran pada pemerintah desa dan permohonan bantuan pada dinas-dinas terkait

Berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa upaya-upaya mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam fungsi kelembagaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Parakanmunggu Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran yaitu melalui pemberian arahan dan petunjuk serta bimbingan pada anggota secara rutin, pengajuan tambahan alokasi anggaran pada pemerintah desa maupun pemerintah daerah, penyediaan sarana dan prasarana pendukung pekerjaan, pemberian arahan dan ajakan pada masyarakat tentang pentingnya partisipasi masyarakat, meningkatkan kemampuan SDM melalui penyelenggaraan pengembangan sumber daya manusia dan menyeleksi anggota untuk menduduki posisi tugas sesuai dengan kemampuan dan kompetensinya, memberikan kesempatan untuk meningkatkan kualifikasi pendidikan dan wawasan pengetahuannya.

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) merupakan sebuah institusi yang memiliki peran, tugas dan fungsi dalam kegiatannya sebagai mitra kerja pemerintahan desa, penampung dan penyalur dari aspirasi-aspirasi masyarakat desa sehingga sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa, merencanakan dan menyusun pelaksanaan pembangunan, menggerakkan dan meningkatkan partisipasi masyarakat maupun swadaya gotong royong dalam pembangunan partisipatif untuk

membangun atau meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat desa.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Fungsi kelembagaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Parakanmunggu Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran bahwa pada umumnya dilaksanakan dengan kurang optimal. Hal ini ditunjukkan dengan sebagian besar informan menyatakan dilaksanakan dengan kurang optimal.
2. Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam fungsi kelembagaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Parakanmunggu Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran berupa terbatasnya sumber daya manusia anggota, minimnya sumber anggaran yang dimiliki, belum memadainya fasilitas pendukung pelaksanaan pekerjaan, kurangnya pemberian arahan dan bimbingan serta ajakan pada anggota, kurangnya kesediaan dan motivasi anggota, menurunnya partisipasi masyarakat dan kurangnya penampungan aspirasi masyarakat serta kurangnya pemberian pembinaan pada anggota
3. Upaya-upaya mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam

fungsi kelembagaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Parakanmunggu Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran yaitu melalui pemberian arahan dan petunjuk serta bimbingan pada anggota secara rutin, pengajuan tambahan alokasi anggaran pada pemerintah desa maupun pemerintah daerah, penyediaan sarana dan prasarana pendukung pekerjaan, pemberian arahan dan ajakan pada masyarakat tentang pentingnya partisipasi masyarakat, meningkatkan kemampuan SDM melalui penyelenggaraan pengembangan sumber daya manusia dan menyeleksi anggota untuk menduduki posisi tugas sesuai dengan kemampuan dan kompetensinya, memberikan kesempatan untuk meningkatkan kualifikasi pendidikan dan wawasan pengetahuannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Depdiknas, (2007). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta. Balai Pustaka
- Hikmat, Harry. (2013). *Strategi Pemberdayaan Masyarakat* (edisi revisi),. Bandung: Humaniora Utama Press
- Ismail Nawawi. (2009). *Public Policy, Analisis Strategi Advokasi Teori dan. Praktek*, Surabaya: PMN
- Manila, I.GK, (2006), *Praktek Manajemen Pemerintahan Dalam Negeri*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Nurman. (2015). *Strategi Pembangunan Daerah*. Jakarta: Raja Grafindo. Persada
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan.
- Suharto, Edi. (2016). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: Alfabeta
- Sunarti, Selly Rahmawati. 2014. *Penilaian dalam Kurikulum (2013)*. Yogyakarta: Penerbit ANDI
- Sutarto. (2012). *Dasar-Dasar Organisasi dan Manajemen*. Jakarta : Garamedia
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Winarno Budi. (2012). *Kebijakan Publik: Studi Analisis Kebijakan*. Bandung: CV Pustaka. Setia
- Yukl, Gary. (2013). *Kepemimpinan Dalam Organisasi*. Edisi Ketujuh. Jakarta: PT Indeks